BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, terbagi kedalam kepulauan – kepulauan yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia juga merupakan Negara Hukum yang berarti segala aktifitas warga Negara selalu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum yang bersifat tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum tentunya akan berpengaruh kepada seluruh kehidupan bernegara khususnya dalam sistem hukum public yang mengatur kehidupan warga Negara dengan pemerintahnya.¹

Di dalam negara penganut negara hukum, maka hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang – undangan yang berpuncak pada konstitusi, dimana dalam konstitusi berisi kesepakatan bersama yang diartikan sebagai hukum dasar negara. Dengan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum dan konstitusi bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau disitilahkan dengan Rule By law Not Rule By Man. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum.²

¹ I Wayan Wahyu Wira Udytama dan I Wayan Eka Arthama, 2022, **Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Pemangku Kayangan Tiga Berbasis Desa Adat Di Bali**, Jurnal Hukum Saraswati, Volume 04 Nomor 01, hlm. 114.

² I Made Hendra Wijaya, 2020, **Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum**, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, hlm. 42.

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan satu sama lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno abad ke – 3 sampai abad ke – 6 SM merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.³

Pesta demokrasi atau yang sekarang ini disebut dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal saja, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan – jabatan politik

³ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, **Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca – Reformasi**, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.⁴

Pemilu juga merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan. Keberhasilan suatu Pemilu tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik setiap warga negara. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses Pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.⁵

Perkembangan regulasi dalam pelaksanaan Pemilu yang cukup pesat pada era reformasi menimbulkan implikasi luas bagi perkembangan Pemilu di Indonesia. Faktor utama penyebab perkembangan regulasi Pemilu ini adalah respon terhadap fakta bahwa Pemilu berkembang pesat sebagai jalan menuju demokrasi substansial. Munculnya metode konvensi suara dengan quota hare pada Pemilu 2014 dan kemudian berganti dengan sainte lague pada tahun 2019 dengan dasar untuk memaksimalkan akomodasi suara dalam Pemilu menjadi salah satu contoh

⁴ Sigit Pamungkas, 2009, **Perihal Pemilu**, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

⁵ Moh.Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, 2019, **Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia**, Lentera Hukum, Faculty of Law Universitas Jember Indonesia, Volume 6 Nomor 1, hlm. 153.

perkembangan sistem Pemilu ini. Selain itu, desain perubahannya banyak yang lahir dari pengalaman praktek Pemilu maupun melalui terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.⁶

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam suatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya suatu negara baru bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas – luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi politik dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, serta membagi beberapa bentuk dari partisipasi politik yang salah satu diantaranya adalah melakukan kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan yang dimaksud mencakup kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang mempengaruhi hasil proses pemilihan.⁷

Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus pada Pemilu adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok

⁶ Sholehudin Zuhri, 2018, **Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**, Jurnal Wacana Politik, Volume 3 Nomor 2, hlm. 94.

⁷ Miriam Budiarjo, 2008, **Dasar – dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 367.

masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Secara yuridis pengertian penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pesta demokrasi atau yang lebih dikenal dengan Pemilu memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal saja, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama.⁸

Pasal 5 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah

⁸ Muflih Ramadhani, 2020, **Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum**, Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 1, hlm. 245.

sebenarnya telah memberikan hak yang sama dan setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik.⁹

Di negara – negara Eropa, ditemukan penurunan partisipasi penyandang disabilitas pada pemungutan suara, penurunan keterlibatan penyandang disabilitas dalam politik praktis, serta penurunan keterlibatan dalam demonstrasi untuk menyikapi kondisi politik yang berkembang di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan adanya stigma negatif dan perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.¹⁰

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ciamis, Kota Metro, dan Kota Surakarta masih ditemukan kurangnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Masih ditemukan bahwa penyandang disabilitas hanya berpartisipasi dalam kegiatan pemungutan suara Pemilu 2019. Di luar tahapan tersebut, penyandang disabilitas tak banyak terlibat. Kendala yang dihadapi pemilih disabilitas adalah kurang validnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), kurangnya pemahaman terkait tata cara untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019, tingkat pemahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sangat kurang terkait dengan kebijakan penyandang disabilitas dalam Pemilu, serta masih banyaknya TPS yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Faktor lain adalah minimnya proses sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas. Permasalahan lain yang dihadapi oleh penyandang disabilitas berasal

⁹ Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum, 2019, **Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember**, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Volume 2 Nomor 2, hlm. 82.

¹⁰ Viera Mayasari Sri Rengganis, et.al. 2021, **Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020**, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Volume 3 Nomor 1, hlm. 117.

dari faktor struktural dan kultural yaitu dari aspek kebijakan pemerintah, masyarakat, dan faktor internal penyandang disabilitas itu sendiri. Kendala tersebut seperti sulit mendaftar menjadi penyelenggara pemilu, kurangnya pemahaman dari KPPS saat membantu disabilitas yang hadir di TPS, serta masyarakat yang kurang menerima perbedaan.¹¹

Di Bali, khususnya di Kabupaten Badung penggunaan hak pilih disabilitas hanya rata – rata 40,89% (202 dari 494 orang) pada Pemilu 2019 dan 52,83% (652 dari 1.234 orang) pada Pilkada Badung 2020. Mereka merasa tidak nyaman dengan tata ruang TPS yang tidak ramah akses disabilitas, disamping ingin tetap berada pada ekosistem yang mereka rasa tidak berbeda.¹² Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) melaksanakan sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Pemilu anggota DPD dengan tujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilih, salah satu yang menjadi sasaran yaitu salah satunya yaitu pemilih penyandang disabilitas. Sedangkan dalam kenyataannya

¹¹ Ibid. hlm. 118.

¹² Bawaslu Kabupaten Badung, **Bawaslu Badung Sampaikan Aspirasi TPS Khusus Disabilitas**, <https://badung.bawaslu.go.id/read/333/BawasluBadungSampaikanAspirasiTPSKhususDisabilitas>, diakses tanggal 10 Februari 2023, pukul 00:44 WITA

masih adanya kelemahan pada tahapan pra pemilihan yaitu sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pemilih disabilitas sehingga kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa terjadi dan menyebabkan hak pilih dari penyandang disabilitas menjadi tidak terpenuhi secara maksimal.

Penulis mengkhawatirkan di Kabupaten Badung kembali terjadi kurangnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu yang akan datang seperti yang terjadi juga di Kabupaten Ciamis, Kota Metro, dan Kota Surakarta. Maka menjadi penting untuk dikaji dalam penelitian ini dengan judul **"PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BADUNG"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan yang didapat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung?
2. Kendala apa yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas maka ruang lingkup masalah dibatasi dalam dua hal yaitu mengenai peranan KPU Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung serta Kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji peranan KPU Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta – fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan antropologi hukum yaitu mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan produk – produk turunannya khususnya yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung.
2. Pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat guna menemukan fakta – fakta yang ada di lapangan yaitu pihak yang diteliti dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten badung dan penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Badung.

¹³ Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

1.5.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber.¹⁴ Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara wawancara dan observasi secara langsung diperoleh dari KPU Kabupaten Badung dan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Badung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan – bahan hukum yaitu: peraturan perundang – undangan diantaranya; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang – Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu . Selain itu juga terdapat literatur – literatur, buku – buku, makalah dan jurnal yang ditulis oleh para ahli terkait dengan hak pilih penyandang disabilitas.

3. Data Tersier

Data Tersier yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum terkait dengan istilah – istilah dalam hak pilih penyandang disabilitas untuk menunjang sumber data primer dan data sekunder.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 124.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Wawancara

Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Wawancara (interview) merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yaitu dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Badung dan masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Badung yang kemudian jawaban – jawaban dari responden dicatat atau direkam yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

2. Teknik Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu KPU Kabupaten Badung untuk mencatat data dan informasi terkait dengan peran dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori – teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di

paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam melindungi hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah konsep – konsep hukum, asas – asas hukum serta landasan teori dari para pakar hukum terkait dengan Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung berdasarkan literatur – literatur yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat, yaitu Teori Perlindungan HAM, Teori Demokrasi, Teori Peranan, dan Teori Sistem Hukum. Serta memaparkan pula tentang KPU Kabupaten/Kota, Pengertian Peran, Pengertian Hak Pilih, Pengertian Disabilitas, dan Profil KPU Kabupaten Badung.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka pada bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan terkait dengan Bagaimana

peranan KPU Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung dengan sub bab yaitu: Perlindungan hak pilih disabilitas terkait perspektif HAM, Kedudukan Disabilitas dalam Pemilu, dan Peran KPU dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka pada bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan terkait dengan Kendala apa yang dihadapi KPU Kabupaten Badung dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Badung dengan sub bab yaitu: Kendala Internal, dan Kendala di Masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak – pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

UNMAS DENPASAR